

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP ADANYA SISTEM
MULTIPARTAI DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN
UMUMLEGISLATIF DI INDONESIA PASCA REFORMASI**

SKRIPSI

Oleh :

LEONYTA FEBYNANDA UTOMO

NIM.C04219021



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA
NEGARASURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

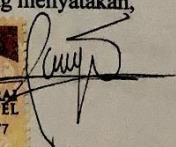
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leonyta Febynanda Utomo
NIM : C04219021
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Adanya Sistem
Multipartai Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum
Legislatif Di Indonesia Pasca Reformasi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Leonyta Febynanda Utomo
NIM. C04219021s

PERSETUJUAN PEMBIMBING

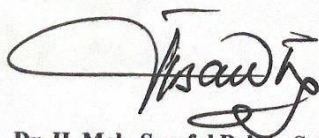
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Leonyta Febynanda Utomo
NIM. : C04219021
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Adanya Sistem
Multipartai Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum
Legislatif Di Indonesia Pasca Reformasi

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 19 Juni 2023
Pembimbing,



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si.
NIP. 197803152003121004

PENGESAHAN

PENGESAHAN

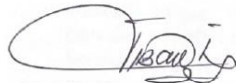
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Leonyta Febynanda Utomo
NIM. : C04219021

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 10 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag. M.Si.
NIP. 197803152003121004

Penguji III



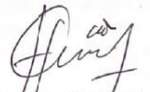
Arif Wijaya, S.H. M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji II



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 19680329000032001

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 10 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sunnah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271990032001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LEONYTA FEBYNANDA UTOMO
NIM : C09219021
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : c09219021@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SYARIAH TERHADAP ADANYA SISTEM MULTIPARTAI
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI
INDONESIA PASCA REFORMASI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 JULI 2023

Penulis

(LEONYTA FEBYNANDA U)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Di Indonesia, jumlah partai politik yang terlalu banyak merupakan salah satu faktor penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintahan di Indonesia. Banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu menyebabkan koalisi yang dibangun untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden terlalu “gemuk” karena melibatkan banyak parpol. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan umum legislatif pasca adanya sistem multi partai setelah reformasi; (2) mengetahui bagaimana pengaruh adanya sistem multipartai dalam Fiqh Siyasah. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Metode penelitian ini ialah mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian ini merujuk pada kajian-kajian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sistem multipartai di Indonesia didasarkan pada Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Penerapan sistem multipartai pasca reformasi berjalan sangat ekstrim (*hyper multyparties*) karena begitu banyaknya jumlah partai politik yang ada. Sistem multipartai yang berjalan saat ini, sama dengan masa Demokrasi Parlementer, mengalami polarisasi dan fragmentasi yang pada *gilirannya mempersulit proses pengambilan keputusan di legislatif*. 2) *tinjauan fiqh siyasah* sistem multipartai termasuk dalam lingkup *fiqh siyasah dusturiyah* dan tidak ditemukan dalil nash yang melarang. Hal tersebut berarti pendapat kebolehan menerapkannya pada sistem kepartaian di suatu negara. Alasannya yaitu

politik bersifat realitas yang **ABSTRAK**



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

selalu berubah sehingga harus diimbangi fiqh baru yang memperhatikan perubahan zaman.

Kata Kunci: Sistem Multipartai, Pemilu, Legislatif, *Fiqh Siyasah*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

In Indonesia, the excessive number of political parties is one of the contributing factors to the ineffectiveness of the government system in Indonesia. The large number of political parties that participated in the election caused the coalition that was built to nominate the president and vice president to be too "fat" because it involved many political parties. The aims of this research are (1) to find out how the implementation of the general election for the legislature after the existence of a multi-party system after the reformation; (2) find out how the influence of the existence of a multiparty system in Fiqh Siyasah. The type of research used is normative juridical research. The data sources used in this study are primary legal sources, secondary legal sources and tertiary legal sources. The method of this research is to process systematically the research materials referring to these studies. The results of the research show that 1) the multiparty system in Indonesia is based on the Government's Decree dated November 3 1945. The implementation of the post-reform multiparty system has been very extreme (hyper multiparties) because there are so many political parties in existence. The current multiparty system, the same as during Parliamentary Democracy, experiences polarization and fragmentation which in turn complicates the decision-making process in the legislature. 2) review of siyasah fiqh multiparty system is included in the scope of siyasah dusturiyah fiqh and no text arguments were found that prohibit it. This means the opinion of the permissibility of applying it to the party system in a country. The reason is that politics is a reality that is always changing so it must be balanced with new fiqh that takes into account changing times.

Keywords: Multiparty system, Elections, Legislature, Siyasaah Fiq

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Dan Hasil Penelitian.....	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	8
G. Definisi Operasional	9
H. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL FIQH SYASAH TERHADAP ADANYA SISTEM MULTI PARTAI	1
.....	1
3	
A. Teori Fiqh Siyasah	13
B. Teori Partai Politik	16
C. Teori Demokrasi Menurut Hans Kelsen.....	19
BAB III SISTEM MULTIPARTAI DALAM PEMILHAN UMUM LEGISATIF PASCA REFORMASI	2
.....	2
2	
A. Sejarah Sistem Multipartai di Indonesia	22

B. Karakteristik Sistem Multipartai Indonesia	25
C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Sistem Multipartai di Indonesia	2
9	
D. Sistem Multipartai dalam Pemilu Legislatif di Indonesia Sebelum dan Pasca Reformasi.....	33
E. Kekurangan Sistem Multipartai.....	36
F. Implikasi Penerapan Sistem Multipartai pada Pemilu Legislatif Pasca Refomasi	4
0	
G. Penerapan Yang Ideal terhadap Sistem Multipartai pada Pemilu Legislatif Pasca Reformasi	42
BAB IV SISTEM MULTIPARTAI PADA PEMILU LEGISLATIF PASCA REFORMASI DITINJAU DARI <i>FIQH SIYASAH</i>.....	44
A. Ruang Lingkup Sistem Multipartai Menurut <i>Fiqh Siyasah</i>	44
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Pemilahan Umum Sistem Multipartai ..	45
C. Hukum Sistem Multipartai Menurut Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i>	51
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN – LAMPIRAN	72

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Admojo, Tuswoyo. “Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014.” *Jurnal Politik*, vol.1, no. 2 (February 21, 2016): 283–315.
<https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.18>
- Budihardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2012.
- Dahlia. *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Skripsi. Lampung, Fak. Syari’ah Uin Raden Intan, 1975
- Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. *FIQH SIYASAH KONTEKSTUALISASI DOKTRIN POLITIK ISLAM*. 1 ed. Jakarta: prenadamedia, 2014.
- Firdaus, Sunny Ummul. Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Konstitusi*, Volume 8 Nomor, April 2011
- Firmanzah. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jaka: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Gusmansyah, Wery. “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2 (2017): 128.
<https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.
- Hasbi, M Ridwan. “Nilai-nilai Oposisi dalam Hadis Nabawi.” *Jurnal Ushuluddin*, 2, XXII (2014): 155–169.
<http://dx.doi.org/10.24014/jush.v22i2.733>.
- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik

- Indonesia.” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 2 no 1 (n.d.): 1–20.
- Hanan, Djayadi. *Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2013
- Iqbal, Muhammad. *fiqh siyasah konstektualisasi doktrin politik islam*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Inu, Kencana Syafiie. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18.
- Karim, Rusli. *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut, cet.I*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Kurniawan, Luthfi J. *Keadaban Politik: Membincang Kekuasaan, Merawat Kewarasan. Cetakan pertama*. Malang: Intrans Publishing, 2021.
- Ma’arif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan, cet.I*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Muhamad, Labolo, dan Ilham Teguh. “Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Pt Rajagrafindo Persada* 1 (2015): 269.
- Munadi. “Oposisi Dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia.” *Resolusi*, vol.2, no.1 (June 2019): 1–20. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v2i1.726>.
- Nurhayati, Agustina. *Fiqh Siyasah*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014
- Partono. “Sistem multipartai, presidensial dan persoalan efektivitas pemerintah.” *Legislasi Indonesia* 5, no. 1 (2008): 13–28. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/286/173>.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Rahardjo, M. Dawam. *Sistem Pemilu: Demokratisasi dan Pembangunan*,

- cet.I .Jakarta: Cidesindo, 1996.
- Ramadhan, Muhamad. *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*. PT Nasya Expanding Management. Vol. 01, 2019.
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Romli, Lili. *Islam Yes Partai Islam Yes; Sejarah Perkembangan Partaipartai Islam di Indonesia*. cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Salim, Zafrullah. “Dampak Sistem Multipartai Dalam Kehidupan PolitikIndonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 1 (2008): 130–164.
- Sarrifudin, Amir. *pembaharuan berfikir dalam islam*. padang: angkasa raya, 1990.
- Setiawan, Bagus. “kedudukan dpd ri dalam sistem tata negara indonesia perspektif siyasah dusturiyah.” universitas islam negeri raden intan lampung, 2017.
- Swantoro, FS. *Meneropong Sistem Kepartaian Indonesia 2020*. Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate, 2004
- Taj, Abdurrahman. *al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: al-Alukah, 2010.
- Taimiyah, Ibn. *al-Siyasah al-Syar’iyah fi Ishlah al-Ra’iy wa al-Ra’yati*,. Mesir: Dar al- Kitab, al-Arabi, 2010
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Prenamedia Group, 2017.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Winarno, Budi. *sistem politik Indonesia era reformasi*. 1 ed. Jakarta: buku kita, 2008.